



**Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas  
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya  
Tahun Anggaran 2022**

***“Tiga Pemda Kembali Raih WTP”***

***Bandung, Subbag Humas dan TU Kepala Perwakilan***

Jumat (05/05), Setelah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bekasi pada April lalu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat kembali menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran (TA) 2022. Laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh eksekutif kepada *stakeholders*. Pemeriksaan LKPD bertujuan memberikan opini kewajaran LKPD dan menyakinkan *stakeholders* bahwa LKPD telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), didukung dengan desain dan implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan LKPD dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Hasil pemeriksaan LKPD dapat digunakan oleh eksekutif, legislatif, dan *stakeholders* untuk pertimbangan pengambilan keputusan.

Bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Jalan Moch Toha No. 164, LHP atas LKPD Pemerintah Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya TA 2022 diserahkan langsung oleh **Kepala Perwakilan, Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA, CPA (Aust), CSFA, ACPA, dengan didampingi Kepala Subauditorat Jabar II, Asdian Samsul Arifin S.H., M.H., CGAP, CFE, ERMCP** yang membawahi wilayah pemeriksaan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya. Adapun LHP diterima oleh masing-masing Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah. LHP LKPD Pemerintah Kabupaten Ciamis diterima oleh **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, H. Dede Herli, S.Pt., M.M., dan Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya**. LHP LKPD Pemerintah Kota Banjar diterima oleh **Ketua DPRD Kota Banjar, Drs. Dadang R. Kalyubi, M.Si., dan Walikota Banjar, Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih, M.Si.** Sementara LHP LKPD Kota Tasikmalaya diterima oleh **Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Aslim, S.H., dan Pj. Walikota Tasikmalaya, DR. Cheka Vigowansyah, S.STP., M.E.**

Opini atas LKPD Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar TA 2022 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Permasalahan yang masih ditemukan pada Pemerintah Kabupaten Ciamis diantaranya adalah belum diaturnya kebijakan akuntansi mengenai properti investasi, pelaksanaan 9 paket pekerjaan belanja persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya yang tidak sesuai kontrak, serta pengelolaan PSU dari pengembang perumahan yang tidak tertib. Sementara permasalahan yang masih ditemukan pada Pemerintah Kota Banjar diantaranya adalah belanja hibah yang belum didukung bukti pertanggungjawaban lengkap, pelaksanaan 8 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yang tidak sesuai kontrak, serta pengelolaan aset tetap yang belum sepenuhnya memadai.

Sementara LKPD Pemerintah Kota Tasikmalaya TA 2022 meraih Opini **WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal**. Atas Opini LKPD Pemerintah Kota Tasikmalaya TA 2022, BPK menekankan pada Catatan A.4.2.3 atas LKPD yang menjelaskan adanya permasalahan terkait kegiatan pembangunan Gedung *Creative Center* yang tidak sesuai ketentuan dan dapat mengakibatkan tidak terjaminnya keselamatan dalam penggunaan. Sementara permasalahan signifikan pada LKPD Kota Tasikmalaya diantaranya adalah terkait pengelolaan retribusi parkir yang belum memadai, pembangunan Gedung *Creative Center* yang tidak sesuai ketentuan, pengelolaan belanja hibah yang belum memadai, dan pengelolaan PSU yang belum tertib.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menyampaikan tindak lanjut rekomendasi kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. BPK membuka kesempatan kepada DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya untuk berkoordinasi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. (\*\*/humas bpk)